

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam upaya mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha, maka pembangunan di bidang ketenagakerjaan harus mencerminkan terpenuhinya hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi pekerja/buruh dan keluarganya sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mengatur pula perlindungan terhadap pengusaha (perusahaan / pemberi kerja).

Keterkaitan pembangunan bidang ketenagakerjaan tidak hanya melalui kepentingan tenaga kerja sebelum, selama dan sesudah kerja, tetapi juga mempunyai dimensi keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif antara lain mencakup pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, serta upaya perluasan kesempatan kerja. Sejalan dengan perubahan yang sangat cepat dewasa ini menuntut instansi pemerintah untuk terus melakukan perbaikan mengikuti dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Selayaknya, perubahan tersebut dilakukan secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan selain melalui perencanaan yang matang juga berorientasi kepada hasil dan dapat dipertanggungjawabkan baik terhadap pimpinan maupun terhadap masyarakat. Keberhasilan suatu instansi pemerintah saat ini lebih ditekankan kepada kemampuannya mengelola sumber daya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebutuhan informasi semakin meningkat, kemudahan dalam mengakses informasi mutlak diperlukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat yang membutuhkan. Tuntutan pelayanan informasi dan pengolahan informasi secara terintegrasi menjadi sangat penting di setiap lembaga, termasuk di suatu Dinas Tenaga Kerja. Teknologi Informasi saat ini telah menjadi kebutuhan bagi perusahaan maupun instansi pemerintah yang berkembang. Hal ini ditandai dengan pengetahuan bahwa informasi merupakan sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh semua perusahaan. Sistem informasi yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain.

Dalam pelayanan umum juga tidak bisa dilepaskan dari masalah kepentingan umum karena inilah yang menjadi asal usul dalam timbulnya istilah pelayanan umum tersebut, dengan kata lain antara kepentingan umum terdapat korelasi dengan pelayanan umum. Tugas terpenting dari setiap instansi pemerintahan adalah memberikan pelayanan, bahkan pada dasarnya pembentukan instansi-instansi pemerintah ditujukan sebagai perangkat utama dalam pemberian pelayanan. Harus diakui, bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat terus mengalami pembaharuan, baik dari sisi paradigma maupun format pelayanan seiring dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dari instansi tersebut juga dalam meningkatnya tuntutan masyarakat dan perubahan di dalam pemerintah itu yang memuaskan bahkan masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang tidak berdaya dalam kerangka pelayanan.

Pengolahan data secara tradisional menjadi tidak efektif karena banyak data yang harus diolah dan tuntutan dalam kemudahan

mengakses suatu data atau informasi yang dibutuhkan. Tuntutan kemudahan dalam pelayanan informasi pada dinas tenaga kerja semakin meningkat, seperti kemudahan dalam mengakses informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan kemudahan dalam berbagai tindakan lainnya seperti pendaftaran kartu kuning yang memerlukan pengolahan data lebih baik.

Proses pendataan tenaga kerja baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari kerja yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang sudah memiliki sistem yang cukup bagus, namun sistem ini masih dijalankan secara konvensional atau manual. Sehingga setiap kartu kuning yang dihasilkan akan digunakan untuk statistik jumlah pencari kerja pada tahun yang bersangkutan agar dapat dibandingkan dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Pelayanan informasi secara online mulai diminati banyak pihak, karena dapat meningkatkan pelayanan informasi yang lebih baik di mana informasi dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja dan di mana saja tanpa terbatas ruang dan waktu.

Berkaitan dengan tugas yang harus dilaksanakan, maka penyediaan pelayanan oleh pemerintah itu sendiri harus difokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik itu sendiri aparat pemerintah sangatlah bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sebagai wujud hal dari penciptaan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang efektif dan terbaik oleh pemerintah karena sistem demokrasi yang ada juga kembali pada rakyatnya.

Pada kartu tanda pencari kerja ini terdapat beberapa ketentuan bagi para pencari kerja, dan sebagai pegawai yang memiliki fungsi sebagai pengantar kerja memiliki kewajiban untuk menjelaskan apa

saja maksud dari poin-poin yang tertera pada ketentuannya, sehingga para pencari kerja tidak merasakan minim akan informasi tersebut hal inilah juga yang harus di laksanakan secara baik pada pengantar kerja sehingga yang menerima pelayanan merasakan kepuasan.

Dari segala bentuk kegiatan yang dilakukan pada instansi tersebut, sebaiknya mampu untuk melaksanakan kerjanya sesuai dengan kriteria penyelenggaraan pelayanan publik yang baik. Serta penerapannya harus lebih banyak kepada pengaturan dan mekanisme kerjanya harus mampu menghasilkan pelayanan yang efektif yang dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada dalam suatu organisasi.

Kecepatan pelayanan juga merupakan hal terpenting karena perlunya target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan. Kejelasan informasi dalam hal pemenuhan persyaratan dalam mendapatkan pelayanan. Dari organisasi tersebut perlunya penyesuaian dengan apa yang menjadi Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat harus direncanakan secara transparan dan lebih mengefektifkan tugas, dan fungsi-fungsi dari lembaga pengawasan itu sendiri. Walaupun anggaran rutin dan pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini semakin membengkak, namun kenyataannya masyarakat selalu merasa belum puas terhadap kualitas jasa maupun barang yang telah diberikan oleh instansi, padahal kata pelayanan adalah kunci keberhasilan dalam berbagai usaha ataupun kegiatan yang bersifat jasa.

Jadi harapan dan pencapaian yang diinginkan adalah membuat Dinas Tenaga Kerja menjadi lebih baik dan efektif dalam proses pembuatan kartu kuning, maka dengan ini mengangkat judul **“Perancangan Sistem Informasi Pembuatan Kartu Pencari Kerja**

Berbasis Web Studi Kasus Di Dinas Ketenagakerjaan Tangerang”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara memperoleh atau mendaftar kartu kuning dengan mudah di Dinas Tenaga Kerja Tangerang ?
2. Bagaimana cara mendapatkan dengan cepat data pencari kerja ?

1.3 Batasan Masalah

Ruang lingkup aplikasi ini melakukan pengelolaan database baru menggunakan teknologi yang mendukung software aplikasi ketenagakerjaan, dengan memperhatikan kecepatan, ketepatan, dan kecermatan dalam proses akses data. Pembuatan aplikasi pendaftaran secara online untuk kartu kuning dengan dinas tenaga kerja, pelayanan informasi dan pengolahan database yang berhubungan dengan masyarakat, seperti biodata dan data yang harus discan.

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pelayanan berapa jumlah pembuatan kartu kuning di Dinas Ketenagakerjaan Tangerang, agar dapat mempermudah melayani keperluan masyarakat yang mempunyai kepentingan mencari pekerjaan dan sebagai persyaratan mencari

kerja, dan meringankan dalam proses pengerjaan sesuai dengan aturan tata cara yang telah diberikan oleh Kantor Dinas Ketenagakerjaan Tangerang kepada para pencalon tenaga kerja.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh yaitu :

1. Pencari kerja dapat mempercepat dan mempermudah untuk memperoleh kartu kuning sebagai pencari kerja.
2. Mempermudah administrator / karyawan dalam mengupdate informasi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pencari kerja.

1.6 Metodologi Penelitian

Untuk memperoleh suatu data yang relevan dan akurat serta sesuai dengan kebutuhan dari pemakai aplikasi, maka harus melakukan pendekatan dengan berbagai cara yaitu :

1. Metode Pengumpulan Data

a. Survey

Pada metode ini peneliti melakukan kegiatan observasi lapangan pada Dinas Ketenagakerjaan, penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data yang relevan sesuai kebutuhan dan mengetahui sistem yang sedang berjalan pada saat ini.

b. Wawancara

Pada proses ini peneliti melakukan wawancara langsung pada Dinas Ketenagakerjaan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka yang dilakukan adalah dengan data yang diperoleh melalui buku-buku literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti sebagai bahan referensi bagi penulis.

2. Metode Pengembangan Sistem

Metode yang digunakan pada pengembangan aplikasi ini adalah dengan menggunakan metode *waterfall*. Alur pada metode tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

1. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh *user*. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak pada tahap ini perlu untuk didokumentasikan.

2. Desain

Desain perangkat lunak adalah proses *multi* langkah yang fokus pada desain pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur pengodean. Tahap ini mentranslasi kebutuhan perangkat lunak dari tahap analisis kebutuhan ke representasi desain agar dapat

diimplementasikan menjadi program pada tahap selanjutnya. Desain perangkat lunak yang dihasilkan pada tahap ini juga perlu didokumentasikan.

3. Pembuatan Kode Program

Desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak, hasil dari tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap desain.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disesuaikan dengan tata cara penulisan laporan skripsi program studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Esa Unggul.

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 2 Landasan Teori

Landasan teori memuat penjelasan ringkas tentang teori / metode / praktek-praktek yang telah dilakukan sebelumnya yang relevan dengan penelitian skripsi.

Bab 3 Gambaran Umum

Gambaran umum di bab ini menjelaskan tentang gambaran singkat secara umum sejarah dan perkembangan Kantor Dinas Ketenagakerjaan Tangerang.

Bab 4 Hasil dan Pembahasan

Bab ini memuat hasil dan pembahasan dari implementasi atau *coding* yang telah dibuat dengan disertai gambar atau tampilan dari halaman aplikasi disertai keterangan.

Bab 5 Kesimpulan dan Saran

Pada bagian kesimpulan berisi kesimpulan sesuai dengan hasil dan pembahasan dari pengujian aplikasi yang telah dibangun dan saran pengembangan aplikasi. Kesimpulan dan saran harus dinyatakan secara terpisah.